



DEPARTEMEN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ANDALAS

SKRIPSI

**ANALISIS KESIAPAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM
IMPLEMENTASI PAJAK KARBON DI INDONESIA: STUDI KOMPARATIF
PEMBELAJARAN DARI MODEL PAJAK KARBON NEGARA MAJU
(Studi Kasus Pada Negara Swedia, Finlandia dan Singapura)**

OLEH:

PUTRI WULANDARI

2210531019

Dosen Pembimbing

Sanda Patrisia Komalasari S.E., M.Si

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi**

PADANG

2026

	No. Alumni Universitas	Putri Wulandari	No. Alumni Fakultas
	BIODATA a) Tempat/Tanggal Lahir: Lubuk Sikaping/ 06 Oktober 2004 b) Nama Orang Tua: Yonafri & Yuhartati c) Fakultas: Ekonomi dan Bisnis d) Jurusan: Akuntansi e) No. BP: 2210531019 f) Tanggal Lulus: 03 Agustus 2026 g) Predikat Lulus: Dengan Pujian h) IPK: 3.63 i) Lama studi: 4 tahun j) Alamat Orang Tua: Kampung Beramam, JR-KP.NAN VI, Nagari aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.		
ANALISIS KESIAPAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM IMPLEMENTASI PAJAK KARBON DI INDONESIA: STUDI KOMPARATIF PEMBELAJARAN DARI MODEL PAJAK KARBON NEGARA MAJU (Studi Kasus Pada Negara Swedia, Finlandia dan Singapura) (Skripsi oleh: Putri Wulandari) Pembimbing: Sanda Patrisia Komalasari S.E., M.Si ABSTRACT <i>Law Number 7 of 2021 introduced a carbon tax in Indonesia as a fiscal instrument to support the national decarbonization agenda. However, its implementation has been repeatedly postponed due to structural challenges in tax administration readiness. This study aims to evaluate Indonesia's tax administration readiness and formulate an adaptive framework for carbon tax implementation by the Directorate General of Taxes (DGT). A qualitative descriptive approach was employed through a Systematic Literature Review (SLR) using the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) protocol. Scientific articles and legal documents were analyzed using NVivo 15 through thematic content analysis. The findings were compared with carbon tax administration models in Sweden, Finland, and Singapore and aligned with the United Nations Handbook on Carbon Taxation for Developing Countries. The results show that Indonesia faces challenges, including the absence of detailed technical regulations, fragmented emissions data systems, and limited carbon accounting competencies among tax officials. The Nordic model highlights the benefits of upstream tax collection and revenue neutrality, while Singapore demonstrates effective digital integration and inter-agency data exchange. Based on these findings, the study proposes a roadmap positioning the DGT as a downstream monetary tax collector (clean data consumer), while environmental authorities serve as clean data providers. This model is expected to improve administrative effectiveness, reduce collection costs, and strengthen accountability in carbon tax implementation.</i> Keywords: Tax Administration, Carbon Tax, Comparative Study, Administrative Framework, Directorate General of Taxes.			

**ANALISIS KESIAPAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM
IMPLEMENTASI PAJAK KARBON DI INDONESIA: STUDI
KOMPARATIF PEMBELAJARAN DARI MODEL PAJAK KARBON
NEGARA MAJU**

(Studi Kasus Pada Negara Swedia, Finlandia dan Singapura)

Oleh:

Putri Wulandari

2210531019

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 memperkenalkan pajak karbon di Indonesia sebagai instrumen fiskal untuk mendukung agenda dekarbonisasi nasional. Namun, implementasinya mengalami penundaan berulang akibat tantangan struktural dalam kesiapan administrasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesiapan administrasi perpajakan Indonesia dan merumuskan kerangka adaptif untuk implementasi pajak karbon oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui Systematic Literature Review (SLR) dengan protokol Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Artikel ilmiah dan dokumen hukum dianalisis menggunakan NVivo 15 melalui analisis konten tematik. Hasil penelitian dibandingkan dengan model administrasi pajak karbon di Swedia, Finlandia, dan Singapura serta diselaraskan dengan United Nations Handbook on Carbon Taxation for Developing Countries. Hasil menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan berupa belum tersedianya regulasi teknis yang terperinci, sistem data emisi yang terfragmentasi, dan keterbatasan kompetensi akuntansi karbon aparatur perpajakan. Model Nordik menunjukkan manfaat pemungutan pajak pada tingkat hulu dan netralitas penerimaan, sedangkan Singapura menunjukkan efektivitas integrasi digital dan pertukaran data antarlembaga. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian mengusulkan peta jalan yang menempatkan DJP sebagai pemungut pajak moneter di hilir (clean data consumer), sementara otoritas lingkungan berperan sebagai clean data providers. Model ini diharapkan meningkatkan efektivitas administrasi, mengurangi biaya pemungutan, dan memperkuat akuntabilitas implementasi pajak karbon.

Kata kunci: Administrasi Perpajakan, Pajak Karbon, Studi Komparatif, Kerangka Administrasi, Direktorat Jenderal Pajak.

Pembimbing Skripsi: Sanda Patrisia Komalasari, SE, M.Si